Bulletin

VOL. 3 NO. 40 | 16-31 MEI 2023

Kekerasan Ekstrem Berbasis Agama Mengancam Indonesia

@islamina_id

Daftar Isi

Dari Redaksi

Islamina Edisi nomor 40 ini mengangkat tema soal kekerasan ekstrem berbasis agama, yang bermula dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Temuan LSI tersebut tentu menjadi *warning* bagi siapa saja, warga dan penyelenggara negara sekaligus. Pemahaman dan ideologi keberislaman masyarakat Indonesia masih mengandung bara api kekerasan dan penolakan kepada kelompok yang berbeda dengan dirinya.

Untuk itu, Islamina mengangkat tema ini dengan tujuan memberikan *warning* sekaligus mendiskusikannya secara lebih mendalam untuk menemukan solusi-solusi yang perlu dilakukan. Ihwal ini dapat dibaca pada kajian. Sementara artikel yang dimuat terkait dengan tren hijrah dan fungsi umat Islam dalam berindonesia.

Akhir kata, Islamina mengucapkan selamat membaca. Semoga bermanfaat.

SUSUNAN REDAKSI
Pemimpin Redaksi: *Hatim Gazali*
Redaksi: *Khoirul Anwar,*
Syahril Mubarok, Ronald Gunawan
Administrasi: *Rina*
Desain/Layout: *wahah.studio*
Email: *redaksi@islamina.id*
Alamat Redaksi: *Jl. Jatimakmur Blok E No25 RT001/RW003 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Jawa Barat 17413*
No Telp: *087887634552*

Editorial

Kembalilah ke khittah berislam

Pada mulanya, menjadi muslim merupakan pilihan individu –tanpa paksaan—demi mendapatkan keselamatan dan kedamaian di dunia dan akhirat. Ketika Islam pertama kali diajarkan oleh Nabi Muhammad, tak seketika bangsa Arab berbondong-bondong untuk memeluknya. Sebagian bahkan memusuhi Nabi Muhammad karena membawa kebaruan, berupa agama baru, yang berbeda dengan keyakinan dan tradisi yang selama ini dipeluk. Sebagian memilih *wait & see* apakah ajaran baru yang dibawa oleh putra Abdullah itu benar adanya seperti yang diprediksi tradisi-tradisi sebelumnya.

Pilihan untuk berIslam—selain tentunya atas hidayah-Nya—karena, salah satunya, agama yang dibawa suami kedua Siti Khadijah ini memberikan kedamaian dan ketenangan batin bagi pemeluknya serta menjadi rahmat bagi seluruh alam. Benar saja, berIslam bukan saja membaca syahadat dan melaksanakan ibadah. Lebih dari itu, berIslam membawa rahmat, tidak hanya bagi pemeluknya tetapi juga sekitarnya.

Buktinya, nabi Muhammad tak seketika memusuhi orang-orang Quraish yang tetap dengan keyakinan semula. Nabi Muhammad tak memaksakan Islam agar dipeluk oleh seluruh suku Arab.

Khittah berIslam itu sebagaimana yang tercermin dari arti “Islam”. Kata Islam berasal dari akar kata *“assalmu, aslama, istaslama, saliim, salaam,* yang berarti damai, taat, berserah diri, bersih dan suci, dan selamat.

Karenanya, Islam memuat ajaran-ajaran yang mengarahkan pemeluknya menjadi pribadi yang bersih, taat, damai, dan selamat. Karena itulah, kemaslahatan menjadi salah satu tujuan utama (*maqasid syariah*) dari syariat Islam.

Jika kita berpegang teguh pada pokok-pokok ajaran Islam tentu berIslam tidak akan menjadi ancaman bagi orang lain. BerIslam tak akan menghadirkan kekerasan dan malapetaka bagi sesama. Sebaliknya, berIslam justru memberi rasa aman dan damai bagi pemeluk agama lain dan rahmat bagi semesta.

Corak keberislaman yang demikian itulah yang menjadikan Islam menjadi magnet bagi bangsa Quraish sehingga dengan cepat pemeluk Islam bertambah pesat. Corak yang demikian itu pula yang menjadikan Islam di Indonesia dipeluk oleh sebagian besar bangsa Indonesia.

BerIslam atau menampilkan Islam dengan cara kekerasan, memberi ancaman bagi sesama bukan saja bertentangan dengan syariat Islam, tetapi juga menjadikan orang lain “tidak tertarik” untuk memeluk Islam. Lalu, masihkah kita terus mempertontonkan keberislaman yang mengancam dan menebar kekerasan? **[Hatim G**

kajian

Indonesia Darurat Kekerasan Ekstrem Berbasis Agama

Oleh: Khoirul Anwar Afa

Semangat kelompok islamisme yang mengusung cita-cita jihad (berperang) atas nama agama selalu ada dan tumbuh di Indonesia meskipun pemerintah tidak tinggal diam terhadap permasalahan ini. Upaya pemerintah melakukan kontra narasi serta melalukan upaya nyata terhadap mereka yang sudah menabrak batas-batas hukum masih belum sepenuhnya mampu menghentikan gerakan sejenis. Oleh sebab itu perlu kajian relevan untuk melahirkan upaya yang tepat tanpa melanggar komitmen negara demokrasi.

Hasil survei yang dirilis oleh LSI (Lembaga Survei Indonesia) pada Mei 2023 cukup membongkar fenomena gunung es tersebut. Survei ini memang lebih spesifik menyasar pada kegiatan tertentu atau dalam klasifikasi Kekerasan Ekstrem (KE) maupun bentuk dukungan terhadap kelompok atau Organisasi Kekerasan Ekstrem (OKE).

Definisi Kekerasan Ekstrem yang dilakukan oleh LSI merujuk pada kriteria yang dikeluarkan oleh USAID tahun 2020 yaitu "Kegiatan Mengadvokasi, terlibat dalam, mempersiapkan, atau mendukung kekerasan, berdasarkan ideologi untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi dan politik." Sedangkan untuk organisasi KE yaitu organisasi yang mendukung, mengampanyekan, atau melakukan KE dengan fokus pada HTI, FPI, ISIS dan JI, (Lembaga Survei Indonesia 2022).

Survei yang dilakukan di berbagai wilayah dengan melibatkan 3090 responden tersebut memberikan kesimpulan jika 4 dari 10 orang sepakat pergi ke negara lain untuk perang membela agamanya yang dianiaya. Menariknya jumlah responden yang menyuarakan gagasan tersebut didominasi oleh mereka yang usianya kurang dari 21 tahun atau setara dengan usia SMP-SMA. Sedangkan secara demografi suara tertinggi didapatkan dari wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan lainnya.

Bentuk dukungan yang menonjol dari temuan tersebut adalah pergi berperang ke negara lain dalam rangka membela agamanya yang dianiaya. Selain itu terdapat dukungan

terhadap KE dengan tidak sepakat terhadap kelompok yang dibencinya mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Adapun komunitas atau kelompok yang dibenci juga dirinci berdasarkan etnis, kelompok agama, dan komunitas. Secara etnis, Tionghoa menempati posisi sebagai etnis yang tidak disuka, sedangkan pada kelompok agama: aliran kepercayaan menempati posisi tinggi yang tidak disukai, dan pada jajaran komunitas, kelompok LGBT menempati posisi tinggi pada yang tidak disukai.

Kategori dukungan terhadap Kelompok Ekstrem (KE) berikutnya ditunjukkan dengan tingginya angka yang mendukung terhadap diterapkannya hukum Syariah. Temuan LSI menunjukkan angka 33% responden mendukung hukum kriminal Islam seperti rajam bagi pelaku zina, potong tangan bagi pencuri dan dibunuh bagi mereka yang keluar dari Islam (murtad).

Temuan ini cukup tinggi karena beberapa faktor di antaranya bisa dilihat dari temuan lain pada pesan intoleransi yang didapat oleh masyarakat terdapat 3,25% mengaku sering mendapatkan pesan untuk hati-hati terhadap kelompok tertentu karena berpengaruh buruk.

Agama dan Peran Pemerintah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi agama, meskipun agama bukan menjadi ideologi negara. Karakteristik demikian sudah mengakar kuat sudah sangat lama, sehingga agama selalu dikaitkan dengan elemen kehidupan sehari-hari baik sosial, politik, ekonomi dan lainnya. Sehingga pandangan para tokoh agama bisa menentukan arah elemen tersebut termasuk pada kasus politik (Ali Machsan Moesa 2008).

Belakangan sering dibincangkan terkait dengan perebutan otoritas agama di ruang publik. Ismail Fajrie misalnya melihat isu otoritas agama di ranah publik dengan mengambil sampling pada sosok figur sufi Habib Luthfi bin Yahya di Pekalongan. Salah satu teori yang digunakan oleh Fajrie dalam mendefinisikan otoritas adalah suatu hierarki hubungan yang dapat terkoneksi dengan kelompok tertentu yang mereka akui secara kuat dapat memberikan keberkahan serta memiliki kapasitas mampu menurunkan dan memindahkan masa lalu melalui contoh-contoh sekarang (Ismail Fajrie 2021). Sehingga otoritas agama ini menjadi referensi pengetahuan agama, kepercayaan dan struktur simbolik oleh penganut agama (Azyumardi Azra, Kees Van Dijk 2010).

Bentuk dukungan yang menonjol dari temuan tersebut adalah pergi berperang ke negara lain dalam rangka membela agamanya yang dianiaya. Selain itu terdapat dukungan terhadap KE dengan tidak sepakat terhadap kelompok yang dibencinya mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Ruang publik yang diperebutkan otoritasnya ini pun beragam serta mengalami perubahan dari media cetak hingga media elektronik. Pada awal abad 20, para tokoh agama (Islam) berebut ruang di media cetak melalui tulisan-tulisan yang berisi tentang fatwa atas kasus-kasus sosial yang muncul (Burhanudin 2017). Tidak jarang fatwa mereka berisi memberikan vonis haram terhadap pendapat ulama lain seperti fatwa penerjemahan Al-Qur'an menggunakan bahasa selain Arab (Michel Laffan, 2015).

Ruang publik sebagai kontestasi fatwa atau lebih luasnya pertarungan ideologi kelompok Islam sudah bergeser pada media internet (Ahmad Najib Burhani 2018), yang kebanyakan diawali oleh ustaz selebriti. Temuan LSI di atas juga masih menempatkan media internet sebagai ruang publik yang mendapatkan tingkat kepercayaan paling tinggi sebagai sumber informasi.

Namun bagi kelompok ekstrem beberapa tahun belakangan ini sudah tidak lagi secara terang-terangan tampil di media publik karena ada kontrol pemerintah. Meskipun tidak tampil secara terang-terangan bukan berarti gerakan mereka tidak ada, justru masih berdatangan seperti datangnya kelompok *Katiba Tawhid wal Jihad* dari Uzbekistan pada April lalu dan mereka membunuh petugas Imigrasi di Jakarta Utara.

Keterlibatan pemerintah dalam melakukan kontrol kontestasi ideologi agama juga dalam rangka menjalankan Undang-undang Dasar yang menjadi kesepakatan para pendiri negara serta berpijak pada Pancasila. Misalnya program Moderasi Beragama (MB) yang dipelopori oleh Kementerian Agama atau membentuk Duta Damai oleh BNPT merupakan upaya mengakomodir ragam tafsir yang muncul di masyarakat dengan memegang komitmen UUD dan Pancasila. Upaya ini juga dalam rangka menjadi usaha preventif atas munculnya radikalisme agama (Arifinsyah Arifinsyah, Safria Andy, 2020).

Pemerintah tidak sendiri untuk mewujudkan umat beragama yang komitmen terhadap UUD dan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Keterlibatan NGO (*Non Government Organization*) justru tampil paling awal sebagai garda depan menjaga harmonisasi umat beragama, keadilan gender, sistem demokrasi dan lainnya saat terjadi tantangan dari Kelompok Ekstrem secara terbuka pada awal reformasi (Ricklefs 2005).

program Moderasi Beragama (MB) yang dipelopori oleh Kementerian Agama atau membentuk Duta Damai oleh BNPT merupakan upaya mengakomodir ragam tafsir yang muncul di masyarakat dengan memegang komitmen UUD dan Pancasila. Upaya ini juga dalam rangka menjadi usaha preventif atas munculnya radikalisme agama

Jihad di Negara Sendiri

Merespons temuan LSI terhadap tingginya jumlah masyarakat Indonesia yang siap pergi ke negara lain untuk berperang membela agamanya yang dianiaya, tulisan ini hendak mengurai makna jihad yang kontekstual untuk kondisi saat ini. Di tengah Indonesia merencanakan bonus demografi pada beberapa tahun mendatang, penting untuk memahami makna jihad yang sebenarnya.

Jihad yang selama ini dimaknai sebagai perjuangan hakikatnya tidaklah salah, karena kata jihad dalam bahasa Arab bermakna *bazlul wus'i* yaitu mencurahkan segala tenaga untuk mencapai tujuan positif yang merupakan tugas utama manusia sebagai khalifah *fil ardl* (pemimpin di bumi). Secara bahasa kata khalifah dibagi pada dua ruang, yaitu: sebagai pemimpin untuk diri sendiri (*khalaif*) dan pemimpin untuk orang banyak (*khulafa'*).

Jihad yang diserukan oleh kelompok tertentu seperti ISIL (*Islamic State of Iraq and Levant*) bertujuan untuk mendirikan negara khalifah Islam yang menguasai beberapa negara bagian di Timur Tengah seperti Iraq, Syria, Jordan, Lebanon, Palestina, Israel, Cyprus, Hatay di Turki bagian Selatan dan Sinai Peninsula di Kairo (Umi Nur Zahidah Mohd Kaslan dan Benny Teh Cheng Guan 2021). Untuk melegitimasi jihad sebagai gerakan militer, mereka merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an. Padahal makna jihad sangat luas termasuk bermakna usaha penuh yang melibatkan psikis, intelektual atau spiritual termasuk jihad melawan hawa nafsu.

Tujuan besar (*maqashid*) dari jihad itu adalah untuk mewujudkan keadaan positif tentu dengan cara yang positif. Bukan melakukan upaya-upaya radikal yang justru merusak tatanan yang sudah baik, dan berakibat menimbulkan ketakutan publik. Meskipun tidak dilakukan di negara sendiri tetapi hakikatnya sama, yaitu membantu orang lain melakukan perbuatan yang tidak membangun.

Menyikapi data tersebut, pemerintah Indonesia tidak boleh kecolongan karena pada tahun 2019 lalu telah merencanakan bonus demografi untuk meraih masa emas tahun 2045 nanti, tepatnya 1 abad menikmati kemerdekaan. Masa emas tersebut dicita-citakan dapat meraih kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kesejahteraan rakyat yang merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa (Kementerian BPN/Bappenas 2019.). Bukan justru masyarakat Indonesia dibayang-banyangi dengan propaganda jihad mewujudkan mimpi negara khilafah.

Pemerintah perlu memperkuat strategi untuk meraih cita-cita emas pada tahun 2045, sehingga di antara strategi yang penting dilakukan adalah membentengi dari propaganda jihadis yang masih saja tumbuh di Indonesia. Kontra narasi di ranah akar rumput perlu dilakukan melalui pendidikan berbasis pada komitmen bangsa dan negara tanpa membawa ego politik sektoral yang terkadang terbelit dengan propaganda agama. Misalnya berkaca pada penolakan oknum Bupati di Banten terhadap pendirian rumah ibadah, atau deklarasi salah satu pejabat Bandung terhadap penolakan salah satu kelompok agama tertentu.

Tindakan-tindakan semacam itu sebagai benih tumbuhnya radikalisme agama sebab tidak mau terbuka terhadap perbedaan, dan multikulturalisme yang hakikatnya diakui oleh negara. Kasus seperti ini juga mengingatkan pada temuan Setara Institute soal tingginya angka kekerasan berbasis KBB yang dilakukan oleh oknum pemerintah (Setara Institute 2022).

Selain pemerintah, peran masyarakat memiliki kontribusi besar mewujudkan cita-cita bangsa. Beberapa tindakan nyata yang dapat dilakukan adalah memperkuat literasi kemajuan, ketangguhan dalam Ilmu Pengetahuan maupun teknologi, ekonomi, dan

sosial politik. Meski demikian tidak cukup berjalan mulus tanpa ada pionir yang mengawali gerakan tersebut.

Tokoh agama selama ini dinilai mampu menjadi pionir dalam gerakan di akar rumput. Sehingga peranan mereka selain sebagai penyebar ilmu-ilmu agama juga sebagai pialang budaya (*cultural broker*) di tengah kehidupan masyarakat (Clifford Geertz 1960).

Dua kelompok penting yaitu pemerintah dan non pemerintah bisa tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat ataupun masyarakat sipil sekalipun memiliki peranan penting untuk menangkal kekerasan ekstrem di Indonesia. Dengan demikian semua harus saling bersinergi memegang komitmen kebangsaan secara kuat dan utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Najib Burhani. 2018. “Plural Islam and the Contestation of Religious Authority in Indonesia.” In N Islam in Southeast Asia: Negotiating Modernity, Singapore: ISEAS Publishing.

Ali Machsan Moesa. 2008. Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama. Yogyakarta: LKiS.

Arifinsyah Arifinsyah, Safria Andy, Agusman Damanik. 2020. “The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia.” ESENSIA 21(1).

Azyumardi Azra, Kees Van Dijk, and Nico J.G. Kaptein. 2010. “Introduction.” In Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam, Singapore: ISEAS Publishing.

Burhanudin, Jajat. 2017. Islam Dalam Arus Sejarah Indonesia. Jakarta: Kencana.

Clifford Geertz. 1960. The Religion of Java. New York: The Free Press.

Ismail Fajrie. 2021. What Is Religious Authority? Cultivating Islamic Comunities in Indonesia. New York: Princenton University Press.

Kementerian BPN/Bappenas. “Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Dan Makmur.” 2019.

Lembaga Survei Indonesia. 2022. LAPORAN SURVEI NASIONAL: Kekerasan Ekstrem, Toleransi, Dan Kehidupan Beragama Di Indonesia. Jakarta.

Michel Laffan. 2015. Sejarah Islam Di Nusantara. Jakarta: Bentang.

Ricklefs, M C. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Yogyakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Setara Institute. 2022. Laporan Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan. Jakarta.

Umi Nur Zahidah Mohd Kaslan dan Benny Teh Cheng Guan. 2021. “Explaining ISIS: Differences and Misconception of Jihad and Qital.” GEOGRAFIA OnlineTM Malaysian Journal of Society and Space 17(4).

artikel

Menyoal Trend Hijrah di Kalangan Milenial

Ahmad Asroni

(Dosen Universitas Islam Indonesia)

Akhir-akhir ini istilah hijrah menjadi semakin populer di telinga masyarakat Muslim Indonesia. Istilah ini kembali banyak digaungkan oleh ustadz-ustadzah selebritas melalui berbagai pengajian dan juga media sosial. Saat ini banyak bermunculan akun hijrah di media sosial dengan ribuan bahkan jutaan *follower*. Akun hijrah dan postingan bertema hijrah juga membanjiri facebook dan twitter. Uniknya, pelaku dan pegiat gerakan hijrah bukan saja berasal dari kalangan masyarakat biasa, tetapi juga public figure seperti selebritas dan olahragawan terkenal.

Di kalangan selebritas ada sederet nama beken semisal Teuku Wisnu, Shiren Sungkar, Sakti “Sheila on Seven”, Dewi Sandra, Arie Untung, Fenita Arie, Uki dan Reza “Noah”, Rizal “Armada”, Mulan Jameela, Sunu “Matta Band”, Irwansyah, Chacha Frederika, dan selebritas-selebritas lainnya. Sementara dari kalangan olahragawan ada sejumlah nama populer seperti Lindswell Kwok, Mohammad Ahsan, Maria Febe Kusumastuti, dan Adriyanti Firdasari, dan Diego Michels. Para pesohor tanah air tersebut tidak hanya berpenampilan syar’i saja seperti berhijab bagi perempuan dan memanjangkan jenggot bagi laki-laki, namun juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan kajian keislaman.

Hijrah sejatinya bukanlah terma yang baru. Istilah ini telah lama populer di kalangan Muslim. Hijrah merupakan peristiwa sejarah di mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berpindah ke luar Mekkah untuk mencari perlindungan diri.

Hijrah dilakukan lantaran saat itu Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya kerap mendapatkan banyak diskriminasi, intimidasi, dan juga persekusi dari kaum kafir Mekkah. Menurut catatan sejarah, ada 2 (dua) kali peristiwa hijrah yang pernah dilakukan oleh umat Muslim. Pertama, hijrah ke negeri Habasyah (Ethiopia).

Hijrah ini dilakukan oleh pengikut awal nabi untuk menghindari persekusi kaum kafir Quraisy Mekkah. Saat itu, para pengikut Nabi mendapatkan suaka politik dari raja Habasyah yang beragama Kristen (Shihab, 2011). Kedua, hijrah Nabi SAW dan pengikutnya dari Mekkah ke Yasrib (kini: Madinah al-Munawwaroh) untuk menghindari perlakuan yang tidak

manusiawi elit-elit penguasa zalim Mekkah. Dalam peristiwa hijrah ini, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya yang terkenal dengan sebutan kelompok muhajirin disambut dan diperlakukan dengan sangat baik oleh masyarakat Madinah.

Peristiwa historis nan monumental tersebut kemudian diabadikan menjadi kalender Islam (kalender hijriyah). Jika kita menyimak sejarah hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para pengikutnya tersebut, maka istilah hijrah bermakna perpindahan secara fisik ke daerah/wilayah lain guna menyelamatkan diri dari kebengisan kaum kafir Mekkah.

Pergeseran Makna Hijrah

Saat ini terma hijrah telah mengalami pergeseran makna. Istilah hijrah disematkan kepada gerakan yang mengajak umat muslim, terutama generasi muda, untuk berhijrah kepada kebaikan dengan menjalankan syariat agama secara *kaffah*. Dalam konteks ini, hijrah dimaknai sebagai transformasi diri seorang Muslim dari yang semula kurang agamis menjadi lebih agamis. Dalam perspektif pelakunya, hijrah berarti meninggalkan kebiasaan buruk seperti meninggalkan pakaian yang mengumbar aurat dan menggantinya dengan berpakaian yang *syar'i* yaitu mengenakan hijab dan cadar.

Selain terjadinya perubahan penampilan fisik, pelaku hijrah juga berupaya melakukan perubahan sikap dan perilaku. Mereka meninggalkan aktivitas-aktivitas yang tidak Islami dan tidak bermanfaat seperti pacaran, dugem, bermusik, selfie, dan nongkrong. Kemudian mereka beralih kepada aktivitas-aktivitas yang Islami. Banyak pula di antara mereka yang menjadi aktivis dakwah.

Pada umumnya pelaku hijrah merupakan anak-anak muda perkotaan yang awam dan dangkal pengetahuan keagamaan (baca: keislaman). Mereka umumnya banyak yang berlatar belakang pendidikan umum. Aktivis hijrah kebanyakan terdapat di sekolah dan perguruan tinggi umum. Mereka tertarik dengan gerakan hijrah lantaran gerakan tersebut menawarkan gaya dan cara hidup yang lebih "Islami". Di antaranya kampanye memerangi kemerosotan moral di kalangan generasi muda seperti pergaulan bebas, tawuran, konsumsi alkohol, dan penyalahgunaan narkoba. Mereka juga tertarik kepada gerakan hijrah lantaran gerakan ini menjanjikan kepastian dalam persoalan keagamaan dan juga menawarkan gagasan khilafah Islamiyah, penerapan syariat Islam, serta gerakan anti-China, asing, dan Barat.

Para aktivis gerakan hijrah umumnya sangat melek teknologi. Dakwah mereka tidak monoton. Mereka memanfaatkan berbagai kanal media sosial untuk berdakwah dan menggaet *follower*. Mereka piawai dalam menggunakan budaya pop untuk menarik simpati kaum milenial. Dalam berdakwah secara virtual, mereka menghiasi berbagai media sosial dengan konten-konten dakwah yang menarik, baik berupa foto, audio, meme, maupun video. Semua itu dikemas dengan bahasa anak muda. Selain mengoptimalkan media sosial, para aktivis hijrah juga menerbitkan berbagai buku dengan kemasan yang menarik dan sarat pesan motivasi. Mereka mampu mencuri perhatian kalangan milenial lantaran mereka piawai dalam mengkomodifikasi agama dengan menawarkan berbagai produk menarik dengan harga yang relatif terjangkau. Beberapa di antaranya adalah baju yang berisi pesan-pesan Islami dan celana cingkrang yang *fashionable*. Produk hijab dan cadar yang diperjual-belikan mereka pun memiliki beragam model dan cukup *fashionable*, namun tetap tampak syar'i.
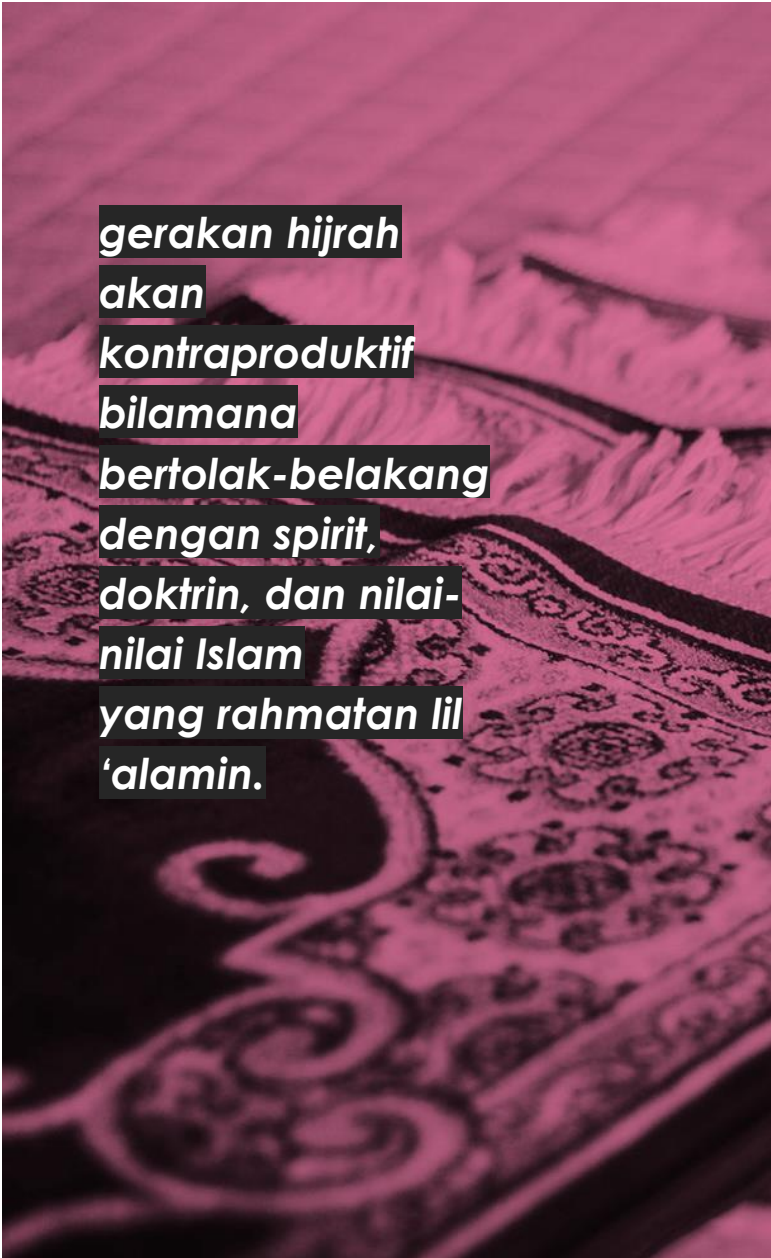
Menuju Gerakan Hijrah Substantif

Sebagai fenomena sosial-keagamaan, gerakan hijrah tentunya patut diapresiasi sepanjang berorientasi pada perbaikan dan transformasi moral umat Muslim. Maraknya generasi milineal dalam berhijrah menandakan kegairahan mereka dalam beragama (Islam). Namun demikian, gerakan hijrah akan kontraproduktif bilamana bertolak-belakang dengan spirit, doktrin, dan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Untuk itu, menurut hemat penulis, seorang muslim yang hendak berhijrah perlu memperhatikan 4 (empat) hal berikut.

Pertama, hijrah harus dimaknai secara substantif bukan simbolik-normatif. Hijrah bukan semata-mata berpakaian *syar'i* serta memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Hijrah bukan sekedar mengenakan celana cingkrang dan menghitamkan jidat. Hijrah bukan sekedar melafalkan berbagai sapaan berbahasa Arab seperti *ana, antum, akhi, ikhwan, ukhti, akhwat*, *ukhti fillah, akhi fillah*, dan "sapaan-sapaan Islami" lainnya. Hijrah bukan dan tidak identik dengan Arabisasi. Hijrah harus dimaknai sebagai proses transformasi diri, yaitu ikhtiar sungguh-sungguh seseorang untuk memperbaiki moral dan meningkatkan kualitas diri. Berhijrah adalah upaya memperbaiki perilaku sebelumnya yang kurang baik menjadi lebih baik. Perilaku yang sebelumnya tidak/belum religius menjadi lebih religius dalam arti sesungguhnya.

Kedua, hijrah harus dibarengi dengan keterbukaan dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam konteks ini, seorang muslim yang memutuskan berhijrah tidak boleh merasa diri yang paling benar sendiri (*truth claim*), eksklusif, dan intoleran terhadap orang/kelompok lain yang berbeda, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Setiap Muslim harus menginsyafi bahwasanya perbedaan dan keragaman merupakan sunnatullah (desain dan kehendak Allah SWT). Perbedaan dan keragaman adalah *lawazimul hayat* (keniscayaan hidup). Oleh karena itu, seorang Muslim tidak boleh saling membid'ahkan apalagi mengkafirkan orang/kelompok lain yang berbeda pandangan keagamaan.

Beberapa waktu silam publik pernah dikagetkan dengan pernyataan Teuku Wisnu, selebritas dan aktivis hijrah, yang menganggap amalan orang yang mengirimkan Surat Al-Fatihah kepada orang yang telah meninggal sebagai bid'ah (menyimpang) karena tidak ada dalilnya dan tidak sesuai tuntunan Nabi Muhamamd SAW. Tentu saja peryataan Teuku Wisnu tersebut tidak mencerminkan kearifan seorang Muslim yang seharusnya menghargai keyakinan kelompok lain yang berbeda dengannya. Terlebih lagi ia adalah seorang *public figure* yang mestinya dapat menjadi teladan (*role model*) masyarakat.

Ketiga, hijrah harus dibarengi dengan kedalaman pengetahuan keislaman. Ghirah atau semangat beragama saja tidak cukup. Semangat berhijrah harus ditopang dengan pengetahuan keagamaan yang mumpuni. Tanpa wawasan keislaman yang memadai, pelaku dan aktivis hijrah rentan tergelincir dalam kesempitan berpikir (*narrow-mindedness*) dan eksklusivisme beragama. Akibatnya, ia cenderung merasa paling benar sendiri dan gampang menyalahkan orang/kelompok lain. Realitas ini marak kita jumpai pada pelaku hijrah. Untuk itu, idealnya pelaku hijrah tidak sekedar belajar agama secara otodidak saja. Pelaku hijrah tidak cukup hanya puas membaca dan mengutip literatur keagamaan dari "Mbah Google" semata, namun harus pula berguru pada ulama-ulama yang otoritatif dan memiliki sanad keilmuan yang jelas.

Keempat, hijrah harus dibarengi dengan komitmen kebangsaan (nasionalisme) yang kuat. Selain komitmen keislaman, seorang pelaku hijrah mestinya memiliki komitmen kebangsaan/keindonesiaan. Ada kecenderungan pelaku dan aktivis hijrah mempertentangkan antara keislaman dengan paham kebangsaan (nasionalisme). Bahkan, di antara mereka ada yang mengharamkan nasionalisme dan Pancasila. Di mata mereka, nasionalisme tidak ada dalam Islam dan karenanya harus ditolak. Demikian pula dengan Pancasila yang dalam pandangan mereka dianggap thoghut. Tentu persepsi demikian tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat ditoleransi. Setiap Muslim harus mengimani bahwa nasionalisme terdapat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Akhirul kalam, manakala keempat hal di atas diaktualisasikan, penulis yakin gerakan hijrah akan sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi kemaslahatan umat Muslim Indonesia. *Allahu'alam bis-shawab*

artikel

Fungsi Umat Islam dalam Berindonesia

Oleh: Fadhil Ashari

Entitas adanya umat manusia di dunia merupakan hal yang tidak boleh dibantah. Perbedaan agama, suku, warna kulit, dan bahasa adalah suatu keniscayaan. Dalam Islam, percaya adanya Sang Maha Pencipta.

Adanya Sang Maha Pencipta, bukti fungsi dari apa itu sifat '*wujūd*'. Perlu diketahui bahwa sesungguhnya wujūd itu ada dua;

Pertama. Wujudnya Allah, Sang Maha Pencipta atau al-Ḫāliq. Dzat yang wajib disembah oleh wujud yang ke dua. *Kedua*, yaitu wujudnya makhluk atau dzat yang diciptakan, yakni wujud alam semesta ini dengan segala isinya.

Di dalam makhluk ada yang disebut manusia. Menurut Alquran bahwa manusia disebut *al-Basyar*, yaitu manusia yang bersifat fisik dengan kelengkapan panca indranya. Lalu manusia juga disebut *al-Insān* atau makhluk psikologis yang kadang bahagia dan kadang resah, kadang gembira dan kadang sedih, kadang senang dan kadang juga terjadi kegundahan, begitulah jiwa manusia.

Kata insan diambil dari kata bahasa Arab, *nasiya – yansa* yang artinya lupa, atau *'uns* yang artinya mesra, juga dari kata *nasa – yanusu* yang artinya bergejolak. Jadi, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang memiliki *tabi'at* mesra, tetapi sering lupa, dan memiliki gejolak keinginan yang tak pernah berhenti.

Selagi manusia dalam keadaan lupa diri dan dalam pengaruh gejolak jiwa dan keinginannya, maka manusia tidak dapat merasakan ketenangan dan ketenteraman hidup. Maka manusia dalam kehidupannya akan selalu mencari ketenangan, kenyamanan, ketenteraman, keharmonisan, dan kedamaian dalam hidupnya. Baik di lingkungan keluarga maupun kehidupan berbangsa.

Mengutip perkataan guru besar Ilmu Psikologi Islam UIN Jakarta, Achmad Mubarok, "Dari keluarga sakinah hingga keluarga bangsa". Secara implisit, dapat dimaknai sebagai kedamaian suatu negara karena telah terbentuk masyarakatnya hidup rukun dari masing-masing keluarga yang harmonis dan tenteram. Istilah ini menurut bahasa Arab disebut sebagai *usratun sa'īdah* atau keluarga bahagia.

Dengan demikian, tentulah manusia harus senantiasa berusaha menjadikan jiwanya ke dalam kondisi jiwa yang tenang, jiwa yang *muṭmainnah*, suatu kehidupan yang mendapatkan ridho Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Fajr:

> *“Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan-mu dengan hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku (hamba-hamba Allah), dan masuklah ke dalam Surga-Ku.”* [Q.S al-Fajr: 27-30]

Jiwa yang tenang atau nafsu *muṭmainnah* juga berkaitan dengan kehidupan dalam keluarga dan kehidupan bersama umat manusia, bahkan jiwa yang tenang berkaitan dengan keharmonisan kehidupan bernegara. Bila negara aman tentu kita akan dapat beribadah dengan khusyu’, tenang, dan nyaman.

Fi As-Silmi Kāffah

Saat ini, suasana bangsa kita dalam keadaan tenang, tenteram, kondusif, harmonis, dan damai. Tugas kita adalah *keep and preserve* (jaga dan melestarikan) kondisi tersebut, seraya menahkikkan diri agar tidak terjebak dalam pusaran permusuhan dan kebencian. Sebab kita sama sekali tidak berharap negara kita masuk ke dalam pusaran konflik atau perseteruan. *Ukhuwah Islamiyah*, *ukhuwah basyariyah* dan *ukhuwah waṭaniyah* benar-benar kita buktikan sebagai perekat kehidupan dan keseharian kita semua.

Kita harus bisa menjaga persaudaraan hidup sesama umat Islam dan harus menjaga persaudaraan hidup sesama umat manusia. Maka dari itu, kita akan dapat menegakkan persaudaraan kehidupan berbangsa. Kita harus menjaga toleransi kehidupan bersama di dalam bernegara.

Di Indonesia, kondisi hidup di tengah masyarakat yang pluralistik, maka tentulah kita harus sepakat memahami pluralisme dalam kehidupan ini, memahami perbedaan yang dapat menumbuhkan kepada kita rasa saling menghargai dan saling menghormati. Karena itu, apabila terdengar orang yang mengesankan Islam sebagai agama radikal dan anti perdamaian, itu hanya akibat pemahaman yang keliru dan belum mengerti sejatinya Islam itu adalah agama yang ramah dan mencintai kedamaian, Islam benar-benar agama yang menjunjung tinggi toleransi, baik terhadap sesama muslim maupun kepada seluruh umat manusia.

Karena itu, apabila terdengar orang yang mengesankan Islam sebagai agama radikal dan anti perdamaian, itu hanya akibat pemahaman yang keliru dan belum mengerti

Banyak ayat dan hadis yang menyatakan tentang hal itu. Bahkan, nama Islam itu sendiri sejatinya berarti ‘damai’, ‘selamat’, ‘kepasrahan’, kepatuhan terhadap syari’at dan hukum-hukum Allah SWT. Seperti dalam firman Allah:

> *“Masuklah kalian ke dalam Islam, ke dalam perilaku damai, ke dalam kepasrahan, ke dalam ruang keselamatan secara keseluruhan, secara totalitas.”* [Q.S. al-Baqarah: 208].

Merujuk kepada maksud ayat di atas, —tentu jika saja kita mengacu kepada Islam yang berarti 'damai' atau 'selamat'— maka arti ayat tersebut kurang lebih berbunyi, "Masuklah kalian ke dalam kedamaian secara keseluruhan" atau "Masuklah kalian ke dalam keselamatan secara totalitas."

Hal ini artinya, tatkala seorang mendeklarasikan dengan menyatakan dirinya memeluk Islam, maka dia harus siap menjalankan konsekuensi keislamannya, yaitu menciptakan kedamaian dan keselamatan. Damai dalam pengertian kewajiban bersama yang harus dilakukan umat Islam; dan selamat dalam pengertian untuk orang lain sesama umat manusia, mereka juga harus selamat dari segala bentuk kekerasan, penindasan, penghinaan, penganiayaan dan seterusnya.

Ayat tersebut dengan sangat jelas mengisyaratkan bahwa umat Islam harus totalitas menjaga kedamaian dan keselamatan kehidupan bersama di dunia ini. Bukan saja memberikan rasa damai kepada golongan tertentu atau kepada orang yang seakidah saja, melainkan juga kepada sesama manusia, bahkan seluruh alam atas dasar kasih sayang dan saling mencintai.

Mari perhatikan kembali ayat Alquran yang berbunyi:

> *"Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam," [Q.S. al-Anbiyā': 107].*

Empat Prinsip Kesantunan

Seiring dengan dogma paham agama yang tidak sejalan dengan kearifan lokal dan berpotensi menyebabkan gagal paham dalam memahami perilaku Islam sesuai *syar'i*, maka apa yang harus kita perbuat?

Ada empat prinsip dasar yang dapat menumbuhkan sikap-sikap santun serta menjaga kearifan, prinsip ini merupakan ciri perilaku Islam Wasaṭiyah atau agama Islam yang berkarakter moderat, yaitu:

1. Sikap Tawassuṭ dan I'tidāl

At-tawassuṭ artinya sikap tengah-tengah. Mengambil jalan tengah atau pertengahan. Sedangkan *i'tidal* mempunyai arti tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri atau berlaku adil dan tidak berpihak kecuali pada yang benar. Sikap *tawasuṭ* dan *i'tidāl* ini bertumpu kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi perilaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Islam dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi agama panutan yang bersikap dan bertindak lurus serta bersifat membangun keteguhan perilaku syar'i umat Islam.

2. Sikap Tasāmuḥ

Tasāmuḥ atau toleran, yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau menjadi masalah *khilafiyah*, serta dalam masalah peradaban dan kemasyarakatan.

3. Sikap Tawāzun

At-tawāzun yang memiliki arti seimbang, tidak berat sebelah atau tidak berlebihan dalam hubungan satu dengan lainya, baik yang bersifat antar individu, antar struktur sosial, antar negara dan rakyatnya. Selain itu, sikap *tawāzun* juga mengajarkan kita untuk seimbang dalam berkhidmah. Khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia, serta khidmah kepada bangsa dan negara. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

4. Amar Ma'rūf Nahi Munkar

Yaitu sikap yang selalu memiliki kepekaan guna mendorong perilaku yang baik, berguna,

dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Selanjutnya mengeliminasi dan menangkal semua hal yang bisa menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Sikap *tawasuṭ* (moderat), *tasāmuḥ* (toleransi), *tawāzun* (seimbang) dan *amar ma'rūf* (mengajak kebaikan), ini semua dalam penerapan di masyarakat tentu tidak mudah bahkan terkadang mendapat tekanan dan tantangan dari pihak tertentu, pihak yang memperjuangkan Islam sebagai alasan kepentingan politik ideologi atas aliran paham keislamannya sendiri.

Negara kita dengan Pancasilanya, selain sebagai dasar negara, juga sebagai landasan moral dan etika kehidupan berbangsa dalam segala sektor sosial, ekonomi, hukum dan budaya. Hal ini artinya, Pancasila dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sampai dengan sila ke lima tentu tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena Islam mengajarkan untuk memahami perilaku damai dan menghayati kesantunan dan kearifan budaya lokal, budaya Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

Konsep bernegara inilah dengan jelas terdapat kesamaan dan sesuai dengan konsep *as-siyāsah* atau politik kebangsaan dalam peradaban manusia, yaitu terbentuknya konsensus dasar prinsip-prinsip ketatanegaraan secara Islami, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam kitab *Adāb Ad-Dunya Wa Ad-Dīn* yang ditulis oleh Syaikh Abu Hasan 'Ali Bin Muhammad Al-Mawardi.

Sudah saatnya umat Islam harus hijrah, menyadari bahwa persaudaraan dan kedamaian-lah yang menjadikan kita kokoh, bukan perselisihan yang saling menuduh kafir kepada mereka yang tidak sepaham dan tidak sejalan. Islam senantiasa menjadi oasis dalam kekeringan, bukan sebagai alasan pecahnya konflik seperti di negara-negara gurun pasir!

Oleh sebab itu, marilah kita mempertebal keimanan serta menguatkan ketakwaan kita, sebab tantangan peradaban zaman semakin berat, maka itulah kita harus terus memperbaikinya.